

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU Kota Parepare. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

Penelitian yang telah dilakukan oleh Achmad Romdhoni, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam), dengan judul penelitian Pemberdayaan Mustahik Zakat Melalui Program Pekan pada Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa, hasil penelitian penulis menyatakan bahwa mekanisme dalam program pembayaran pekan yang dilakukan yayasan griya yatim dan dhuafa baik dalam prosedur dan tujuan pelaksanaannya kepada mustahik sesuai dengan prosedur yang sudah terencana sehingga program dapat terlaksana dengan baik. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Achmad Romdhoni yaitu membahas tentang pemberdayaan mustahik, kemudian perbedaannya adalah penelitian Achmad Romdhoni berfokus pada pemberdayaan mustahik melalui program pekan pada yayasan griya yatim dan dhuafa, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang pemberdayaan mustahik melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU kota Parepare.⁴

Penelitian yang telah dilakukan oleh Megawati, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, dengan judul

⁴Achmad Romdhoni, "Pemberdayaan Mustahik Zakat Melalui Program Pekan pada Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa" (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam): Jakarta, 2015), h. 10.

penelitian Peran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie, hasil penelitian penulis menyatakan bahwa Peran dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie sudah berjalan dengan bagus, Setelah mustahik mendapatkan dana zakat produktif adanya peningkatan pendapatan ekonomi mustahik dari sebelumnya. Dan sudah mampu mempengaruhi perekonomian ekonomi mustahik, dengan adanya dana zakat produktif dapat mengembangkan usaha mustahik ke arah yang lebih baik. Adapun persamaan penelitian penulis Megawati yaitu membahas mengenai pemberdayaan ekonomi mustahik, kemudian perbedaannya adalah penelitian Megawati lebih berfokus pada Peran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie, sedangkan yang dilakukan penulis berfokus pada pemberdayaan mustahik melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU kota Parepare.⁵

Penelitian yang telah dilakukan oleh Evita Dwi Atmaja, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Jurusan Ekonomi Islam, dengan judul penelitian Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta, hasil penelitian penulis menyatakan bahwa ada peningkatan terhadap pendapatan mustahik dan mampu meningkatkan ekonomi mustahik. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Evita Dwi Atmaja yaitu membahas tentang pemberdayaan ekonomi mustahik, kemudian perbedaannya pada lokasi, waktu penelitian dan sampel yang diambil.⁶

⁵Megawati, "Peran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie" (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Banda Aceh, 2019), h. 78.

⁶Evita Dwi Atmaja, "Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Yogyakarta, 2018), h. 8.

Tulisan oleh Achmad Syaiful Hidayat Anwar, dengan judul penelitian Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat, hasil penelitian penulis menyatakan bahwa model pendayagunaan zakat yang terkumpul baik dari LAZ maupun BAZ serta mendistribusikan zakat tersebut dengan cara bekerja sama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna menunjang terlaksananya program kemitraan. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Achmad Syaiful Hidayat Anwar yaitu membahas tentang pemberdayaan ekonomi mustahik, kemudian perbedaannya adalah penelitian Achmad Syaiful Hidayat Anwar lebih berfokus kepada pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemberdayaan mustahik melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU kota Parepare.⁷

Tulisan oleh Muhammad Nizar dengan judul penelitian Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di masjid besar syarif hidayatullah karangploso Malang, dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa model pemberdayaan ekonomi pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso dilihat dari sisi pemanfaatannya digolongkan kepada dua model, yaitu model distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Muhammad Nizar yaitu membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian perbedaannya adalah penelitian Muhammad Nizar lebih berfokus kepada model pemberdayaan ekonomi yaitu model distribusi konsumtif dan distribusi produktif, sedangkan penelitian

⁷Achmad Syaiful Hidayat Anwar, 'Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Zakat', *Pemberdayaan Ekonomi* 15. 1 (2016), h. 60.

penulis berfokus pada pemberdayaan mustahik melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU kota Parepare.⁸

Tulisan oleh Nurul Huda, dengan judul penelitian Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di LAZISMU Surakarta, dari hasil penelitian penulis menyatakan penelitian yang dilakukan oleh saudara Nurul Huda memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas tentang pemberdayaan terhadap mustahik yang telah dilakukan oleh LAZISMU, sedangkan perbedaan antara penelitian saudara Nurul Huda membahas tentang pemberdayaan ekonomi mustahik melalui beberapa program-program LAZISMU, sedangkan penelitian penulis berfokus pada 1 program LAZISMU yakni pemberdayaan mustahik melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga⁹

B. Tinjauan Teori

1. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.¹⁰ Rappaport mengartikan “*empowerment*” sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya.¹¹ Pemberdayaan masyarakat merupakan

⁸Muhammad Nizar, ‘Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang’, *Malia* 8.1 (2016), h. 41.

⁹Nurul Huda, ‘Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di LAZISMU Surakarta’, *Suhuf* 31. 2 (2019), h.161.

¹⁰Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan* (Bandung: Humaniora, 2008), h. 82.

¹¹Adi Fahrudin, Ph. D., *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2012), h. 16.

serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik.¹² Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk,

¹²Engking Soewarman Hasan, *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul* (Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002), h. 56-57.

penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya.¹³

Menurut Moh. Ali Aziz dkk dalam buku *Dakwah, Pemberdayaan* adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan ini adalah beralihnya fungsi individu yang semula menjadi objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subjek dengan subjek lain.¹⁴

Menurut Ife pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- 1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
- 2) Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- 3) Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- 4) Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.

¹³K Suhendra, *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: alfabeta, 2006), h. 74-75.

¹⁴Moh. Ali Aziz, *et al.*, eds., *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 169.

- 5) Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
 - 6) Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
 - 7) Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.¹⁵
- b. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek- aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi:

1) Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

2) Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan

¹⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 59.

manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

3) Kesadaran Kritis

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

4) Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.

5) Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta

mengelola sumber daya yang dimiliki.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- 3) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.
- 4) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- 5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.¹⁶

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk masyarakat serta individu yang mampu mandiri dalam menjalani kehidupan.

Menurut Mardikanto, tujuan pemberdayaan perbaikan pendapatan yaitu dengan tercapainya perbaikan usaha maka akan memperbaiki keadaan pendapatan keluarga

¹⁶Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat & JPS* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 138-139.

atau masyarakat, dengan pendapatan yang baik maka selanjutnya akan ada perbaikan lingkungan baik fisik maupun sosial karena pendapatan masyarakat yang rendah menjadi penyebab kerusakan lingkungan, selanjutnya yaitu terjadi perbaikan kehidupan setelah tercapai perbaikan pendapatan dan lingkungan, dan yang terakhir adalah perbaikan masyarakat yaitu dengan melalui tercapainya perbaikan kehidupan dan lingkungan.

Berdasarkan pendapat Totok Mardikanto, dapat ditegaskan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memperbaiki segala aspek dan sisi kehidupan di masyarakat yang masih belum optimal. Perbaikan-perbaikan tersebut meliputi perbaikan pendidikan, usaha, pendapatan masyarakat, lingkungan dan lain sebagainya.¹⁷

d. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi

Dalam realisasinya pemberdayaan ekonomi yang di galangkan oleh pemerintah dan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang ini sangatlah sulit di terima dan dijalankan oleh masyarakat, tentu ini tidak terlepas dari kendala yang dihadapi baik kendala yang berasal dari dalam ataupun luar masyarakat. Menurut Soemarno permasalahan pemberdayaan masyarakat apabila di tinjau dari aspek ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha yang produktif.

¹⁷Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 111.

- 2) Kurangnya penciptaan akses masyarakat ke input sumber daya ekonomi berupa kapital, sumber daya alam, lokasi berusaha, informasi pasar dan teknologi produksi.
- 3) Lemahnya kemampuan masyarakat kecil untuk mengembangkan kelembagaan ekonomi yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saingnya.¹⁸

e. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yakni:

1) Tahapan persiapan

Tahapan ini meliputi penyiapan petugas (community development), dimana tujuan utama ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota agen perubah mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahap penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. Pada tahap inilah terjadi kontak dan kontrak awal dengan kelompok sasaran.

2) Tahap Assessment

Proses assessment yang dilakukan disini adalah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien. Dalam proses penilaian ini dapat pula digunakan teknik SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

¹⁸Mangku Purnomo, *Pembaharuan Desa Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa* (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2004), h. 87.

Pada tahap ini agen perubah (agen of change) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4) Tahapan Pemformulasikan Rencana Aksi

Pada tahap ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

5) Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerja sama antar warga.

6) Tahap Evaluasi

Tahap ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakuan dengan melibatkan warga.

7) Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri. Tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau

karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan.¹⁹

2. Mustahik

a. Pengertian Mustahik

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.²⁰ Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai kehendaknya.²¹ Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan yakni sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah/9: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²²

Berdasarkan ayat diatas, penjelasan 8 golongan penerima zakat itu sebagai berikut:

¹⁹Achmad Romdhoni, "Pemberdayaan Mustahik Zakat Melalui Program Pekan pada Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa" (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam): Jakarta, 2015), h. 30-42.

²⁰Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 4.

²¹Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW* (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), h.381.

²²Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015),h. 196.

1) Fakir

Fakir yaitu orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha. Atau mereka adalah seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat dinafkahkan untuk diri sendiri dan keluarganya selama setengah tahun, maka ia adalah fakir, ia diberi dari zakat sesuatu yang mencukupi dirinya dan keluarganya selama setahun.

2) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta yang dapat menutupi separuh atau lebih kebutuhannya, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan selama setahun penuh, maka mereka diberi sesuatu yang dapat menyempurnakan kekurangan untuk nafkah setahun. Jika seseorang tidak memiliki uang namun ia memiliki sumber pendapatan, seperti profesi atau gaji, atau investasi yang dapat memberikan kecukupan padanya, maka ia tidak diberi zakat, sebagaimana Nabi Muhammad saw bersabda: “tidak ada bagian bagi orang kaya, tidak pula bagi orang yang kuat dan berpenghasilan.

3) Amil

Amil (pengelola) zakat adalah, orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat, memilih-milih, meneliti orang-orang yang membutuhkan, kemudian membagi-bagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka diberikan haknya sesuai dengan pekerjaan dan dicukupi kebutuhan-kebutuhannya secara makruf, seperti halnya hakim, jaksa dan pejabat. Sedangkan Menurut Imam Syafi'i, mereka mendapat seperdelapan. Oleh karena kerja pengurus zakat mendapat imbalan yang sudah maklum atas pekerjaan

yang dilakukan amil da;am kedudukanya sebagai pekerja, maka ia berhak mengambil imbalan meskipun dia orang kaya, memiliki harta satu nisab.²³

4) Muallaf

Yang termasuk dalam kelompok ini antra lain orang-orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam, mereka diberikan bagian dari zakat agar niat mereka masuk Islam menjadi kuat dan kelompok ini diharapkan kecendrungan hati dan keyakinany untuk beriman kepada Allah swt. Mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin sehingga orang-orang yang baru memeluk islam yang mungkin kehilangan hartanya sangat terbantu untuk keperluan peningkatan keimanan dan kehidupannya.

5) Budak

Termasuk didalamnya memerdekakan budak dari uang zakat dan membantu para budak yang ingin membeli dirinya dan membebaskan tawanan Islam.

6) Gharim (Orang-orang yang berhutang)

Gharim yaitu orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi hutangnya baik sedikit maupun banyak, meski mereka kaya makanan, maka jika ada seseorang yang memiliki pemasukan yang mecukupi untuk makanan buat dirinya dan keluarganya, namun ia memiliki hutang yang ia tidak mampu membayarnya, maka ia diberi zakat untuk sekedar menutupi hutangnya, dan tidak boleh menggugurkan hutang kepada fakir yang berhutang lalu menggantinya dari uang zakat.

7) Fisabilillah

Fisabilillah yakni jihad fi sabilillah, para Mujahid dapat diberi zakat sejumlah yang dapat mencukupi mereka dalam berjihad, dan digunakan untuk membeli peralatan

²³Muhammad Abu Zahrah, Zakat Dalam Perspektif Sosial, (Jakarta: PT. Pustaka Fir,daus, 1995) h.151-152

jihad. Dan termasuk dalam sabilillah adalah: menuntut ilmu syar'i, pelajar ilmu syar'i dapat diberi uang zakat agar bisa menuntut ilmu dan membeli kitab yang diperlukan, kecuali jika ia memiliki harta yang dapat mencukupinya dalam memenuhi kebutuhan itu.

8) Ibnu sabil

Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpegian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat.²⁴

Syarat-syarat Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat adalah:

- a) Dalam keadaan membutuhkan
- b) Perjalanya bukan perjalanan maksiat
- c) Pada saat membutuhkan tidak ada orang yang memberi pinjaman.

b. Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan mustahik merupakan proses pembinaan yang dilakukan oleh Lazismu kepada delapan asnaf yang sudah disebutkan dalam Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 dan pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta LAZISMU zakat kepada mereka yang berhak terbagi ke empat bagian, yaitu:

- 1) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal usaha kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut.
- 2) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para

²⁴Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, terjemah oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 289

fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apapun, baik kerajinan maupun perdagangan.

3) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidak mampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat (amil) dan para muallaf.

4) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan di atas. Diantaranya adalah hamba sahaya. Ibn sabil, dan orang yang mempunyai banyak utang.²⁵

Dalam pemberdayaan mustahik pemberdayaan mempunyai arti yaitu memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini adalah mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil.

3 Ekonomi Keluarga

a. Pengertian Ekonomi Keluarga

Secara bahasa ekonomi terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan keluarga. Ekonomi merupakan tingkahlaku manusia secara individu atau bersama-sama dalam menggunakan faktor yang mereka butuhkan. Adapun keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orangtua mereka yang telah lanjut usia.

²⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 84.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya (sekelompok komunitas dari masyarakatnya).

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosial ekonomi keluarga
 - 1) Faktor-faktor ekonomi
 - a) Kemiskinan
 - b) Pengangguran
 - c) Tidak adanya tempat tinggal
 - d) Terlalu banyak penghuni rumah dan tidak ada cara untuk istirahat²⁶
 - 2) Dalam rumah tangga
 - a) Faktor Intern, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi (memakai benda/jasa untuk memenuhi kebutuhan) rumah tangga yang berasal dari rumah tangga itu sendiri.
 - (1) Sikap : kebiasaan hidup hemat
 - (2) Kepribadian : kepribadian seseorang berbeda dengan kepribadian orang lain
 - (3) Motivasi : dorongan dalam memenuhi kebutuhan berbeda-beda
 - b) Faktor ekstern adalah faktor yang mempengaruhi kehidupan konsumsi (memakai barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan) rumah tangga yang

²⁶Mustofa Fahmi, *Kesehatan Jiwa dalam keluarga Sekolah dan Masyarakat, Jilid I, Terj. Zakiyah Daradjat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 73-74.

berasal dari luar rumah tangga itu sendiri.

- (1) Kebudayaan : kebudayaan sesuatu suku bangsa
- (2) Kelas sosial : berpengaruh terhadap kebiasaan
- (3) Keluarga : pertalian keluarga yang erat akan berpengaruh terhadap pendistribusian pendapatan

4 Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA)

BUEKA merupakan skema program pemberdayaan ekonomi umat yang diluncurkan oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah. Langkah Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah telah berhasil memfasilitasi setiap anggotanya dalam suatu wadah pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis ekonomi keluarga. Salah satu program Majelis Ekonomi & Ketenagakerjaan Aisyiyah yaitu menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai gerakan memberdayakan ekonomi umat. Kemudian program revitalisasi atau penguatan kembali Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA) di seluruh tingkatan. Pimpinan Pusat Aisyiyah meluncurkan sebuah skema pemberdayaan yang dinamakan Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah atau populer dengan sebutan BUEKA.

Skema ini dirancang untuk memberdayakan kaum ibu rumah tangga untuk sekurang-kurangnya memiliki kegiatan usaha mandiri. BUEKA diharapkan menjadi upaya konkrit dari Pimpinan Aisyiyah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi yang bisa dilakukan oleh kalangan ibu-ibu. Melalui BUEKA, ibu-ibu bisa menopang kebutuhan rumah tangga, disamping juga mengasah jiwa wirausaha, mencari peluang-peluang baru dalam bidang ekonomi.

Gerakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga dengan nama program BUEKA. Program BUEKA dijalankan melalui strategi pengembangan usaha bersama (Usaha Kelompok Perempuan).

Program BUEKA adalah salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab Aisyiyah dan LAZISMU untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan perempuan dalam berbagai aspek termasuk aspek mental dan ekonomi. Komitmen tersebut sebagai panggilan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sehingga terwujud Islam sebagai Rahmatan lil Alamin.²⁷

C. Tinjauan Konseptual

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik.²⁸

2. Mustahik

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.²⁹ Allah swt telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat yakni dalam QS. At-Taubah/9: 60, mustahik yang dimaksud pada penelitian ini adalah fakir dan miskin.

²⁷Nurul Huda, *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di LAZISMU Surakarta*, h 169-170.

²⁸Engking Soewarman Hasan, *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul*, h. 56-57.

²⁹Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 4.

3. Ekonomi Keluarga

Secara bahasa ekonomi terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan keluarga. Ekonomi merupakan tingkahlaku manusia secara individu atau bersama-sama dalam menggunakan faktor yang mereka butuhkan. Adapun keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang telah lanjut usia.³⁰

4. Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA)

Program BUEKA adalah salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab Aisyiyah dan LAZISMU untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan perempuan dalam berbagai aspek termasuk aspek mental dan ekonomi.³¹

5. LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga zakat infak sedekah tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana, zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.³²

LAZISMU Kota Parepare memiliki program pemberdayaan di bidang ekonomi ada yang dinamakan BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga) merupakan program dengan tujuan untuk 1) pemberdayaan masyarakat; 2) diberikan bantuan modal usaha kepada mustahik.

³⁰<https://id.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluarga> (30 Maret 2021)

³¹Nurul Huda, *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di LAZISMU Surakarta*, h 169-170.

³²<https://lazismu.org/latar-belakang> (22 Januari 2021).

Berdasarkan pada pengertian diatas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah cara atau proses yang dilakukan LAZISMU Kota Parepare dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola bantuan modal usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarganya melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga LAZISMU Kota Parepare.

D. Kerangka Pikir

LAZISMU Kota Parepare menyalurkan atau mendistribusikan zakat produktif untuk memberdayakan mustahik melalui proram Bina Usaha Ekonomi Keluarga. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan ekonomi mustahik agar hidup mandiri dan dapat mencapai kesejahteraan ekonomi keluarganya sehingga terjadi perubahan status dari mustahik menjadi muzakki. Melalui program tersebut, mustahik yang menerima bantuan modal usaha ada yang berdaya dan ada juga yang tidak berdaya, untuk mengetahui hal tersebut tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan mustahik sehingga ada kesinambungan program bina usaha ekonomi kelurga dalam memberdayakan mustahik.

Untuk lebih memudahkan dalam membaca kerangka pemikiran, penulis mencoba meng gambarkannya yaitu sebagai berikut:

